

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait hubungan antara kinerja lingkungan dan *Carbon Emission Disclosure* telah dilakukan oleh (Setiawan & Iswati, 2019). Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan lingkungan hidup, kinerja lingkungan hidup, dan pengungkapan emisi karbon di Indonesia saling berhubungan. Industri perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017 menjadi sampel penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, kinerja lingkungan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menerima penghargaan PROPER dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mampu mematuhi aturan pemerintah untuk mengurangi dan mengungkapkan emisi gas rumah kaca.

Selain variabel kinerja lingkungan, kepemilikan institusional menjadi salah satu variabel yang diduga dapat memengaruhi *Carbon Emission Disclosure*. Penelitian terkait hubungan antara kepemilikan institusional dan *Carbon Emission Disclosure* telah dilakukan oleh (Pratiwi, 2018). Penelitian dilakukan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan emisi karbon diantaranya regulator, kepemilikan institusional, ukuran, dan profitabilitas. Perusahaan manufaktur dan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2012-2016 menjadi fokus penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional merupakan faktor yang dapat memengaruhi pengungkapan emisi karbon. Hal ini menunjukkan

bahwa makin tinggi tingkat kepemilikan saham oleh pihak institusi maka akan semakin besar pula kewaspadaan investor terhadap kinerja manajer perusahaan, hal itu mendorong pemangku kepentingan untuk menekan perusahaan agar mengungkapkan semua informasi perusahaan secara transparan, termasuk pengungkapan emisi karbon untuk keberlanjutan perusahaan (Pratiwi, 2018).

Variabel lain yang diduga dapat memengaruhi pengungkapan emisi karbon yaitu ukuran dewan direksi, penelitian terkait hubungan antara ukuran dewan direksi dan *Carbon Emission Disclosure* telah dilakukan oleh (Nasih et al., (2019). Penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan antara ukuran perusahaan, korporasi tata kelola, dan *carbon emission disclosure* di Indonesia, perusahaan pertambangan dan agrikultur di Indonesia periode 2011-2016 menjadi fokus penelitian ini. berdasarkan hasil penelitian, perusahaan dengan dewan direksi yang lebih besar cenderung mengungkapkan tingkat emisi karbonnya, berdasarkan hasil tersebut peningkatan jumlah direksi dapat memengaruhi keputusan perusahaan untuk mencapai transparansi yang lebih baik dalam mengungkapkan keberlanjutan lingkungan perusahaan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Legitimasi

Teori legitimasi menerangkan bahwa perusahaan harus selalu berusaha menjamin tindakan mereka dilakukan sesuai dengan batas-batas dan standar masyarakat. Selanjutnya, manajemen perusahaan akan memenuhi harapan masyarakat dan manajemen sumber daya (Khan, 2010). Legitimasi adalah salah satu faktor yang memotivasi manajemen untuk mengadopsi dan melaporkan praktik sosial (Guthrie & Parker, 1989). Suatu organisasi dapat kehilangan legitimasinya jika ada

perbedaan antara organisasi dan nilai-nilai sosial yang menimbulkan kesenjangan legitimasi (Khan et al., 2013).

Teori ini menerangkan bahwa perusahaan harus memperhatikan keadaan lingkungan sosial mereka beroperasi, agar perusahaan mendapatkan dukungan dari masyarakat dan menjadi inti dari sosial tersebut (Anggraeni & Djakman, 2017). Teori ini menerangkan bahwa perusahaan akan secara sukarela mengungkapkan laporan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan untuk mendapatkan legitimasi dan memenuhi permintaan pemangku kepentingan atau memberi isyarat kepada mereka (Luo et al., 2013).

Perusahaan dapat memanfaatkan laporan tahunan untuk menunjukkan pembangunan berkelanjutan mereka guna mendapatkan pengakuan sosial. Dengan adanya pengakuan sosial maka nilai perusahaan diprediksi akan meningkat sehingga berdampak pada peningkatan laba. Hal ini dapat mendorong atau membantu investor untuk mengambil keputusan investasi (Khan et al., 2013). Menurut teori legitimasi, manajemen senior suatu organisasi bertanggung jawab untuk mengenali kesenjangan legitimasi, melakukan kegiatan sosial yang relevan, dan mengungkapkannya kepada pemangku kepentingan untuk memastikan akuntabilitas.

2.2.2 Teori Stakeholders

Teori pemangku kepentingan menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya bertindak demi kepentingan mereka, namun harus bermanfaat bagi stakeholder. Stakeholders akan memberikan tekanan pada perusahaan dan mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan lingkungan (Ghomi & Leung, 2013).

Sejalan dengan teori stakeholder, yang didasarkan pada pernyataan bahwa perusahaan akan tumbuh pesat menjadi lebih signifikan dan mendapat dukungan masyarakat bila perusahaan menunjukkan akuntabilitas, serta kesediaan mereka untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar, luas, dan konsisten, serta tidak terbatas hanya pada pemegang saham (Ariani, 2017).

Teori *stakeholder* merupakan elemen mendasar dari tanggung jawab sosial perusahaan, dalam sistem terbuka di mana organisasi berinteraksi dengan masyarakat atau kelompok yang berbeda dengan kebutuhan, harapan dan tuntutan mempersonifikasikan setiap interaksi (Harmoni, 2013). Perusahaan harus menjelaskan, berkonsultasi, dan melibatkan para pemangku kepentingan dalam programnya untuk memastikan bahwa aktivitasnya dipandang relevan baik bagi bisnis maupun pemangku kepentingan (Harmoni, 2013) dengan mengungkapkan laporan keberlanjutan yang didalamnya terdapat informasi tentang tingkat emisi karbon perusahaan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi bagi para pemangku kepentingan (Sulistiyowati & Tumirin, 2023).

Berdasarkan teori *stakeholder*, manajemen perusahaan diharapkan untuk dapat melakukan aktivitas sesuai dengan yang diharapkan stakeholder dan melaporkannya kepada stakeholder (Abeysekera & Guthrie, 2004). Pengungkapan emisi karbon dapat membantu para pemangku kepentingan untuk memahami nilai, kebijakan, dan motif perusahaan untuk menangani emisi karbon yang dihasilkan (Monica et al., 2021)

2.2.3 Carbon Emission Disclosure

Carbon emission disclosure (Pengungkapan Emisi Karbon) memiliki tujuan untuk mengevaluasi emisi karbon yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dan

menetapkan tujuan untuk menguranginya (Cahya, 2016). Tujuan perusahaan adalah untuk mengurangi emisi karbon, yang berarti mereka harus bertanggungjawab atas dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan (Akhiroh & Kiswanto, 2016).

Dalam melakukan pengungkapan emisi karbon, perusahaan diwajibkan mengklasifikasikan emisi mereka ke dalam satu dari tiga kategori, yaitu kategori 1 meliputi emisi langsung dari proses pembakaran dan produksi bahan kimia, kategori 2 berasal dari emisi tidak langsung dari pembelian dan pemakaian listrik oleh perusahaan, kategori 3 berasal dari kegiatan usaha perusahaan, namun sumber daya tersebut berasal dari sumber daya yang tidak dimiliki atau dikelola oleh perusahaan. Hal ini termasuk memisahkan dan memproduksi bahan yang dibeli, mengangkut bahan bakar yang dibeli, dan menggunakan barang dan jasa yang dijual (Bae Choi et al., 2013).

Industri usaha yang intensif menggunakan bahan bakar fosil adalah industri pertambangan dan industri manufaktur. Selain itu, industri pertanian juga merupakan industri yang memiliki tingkat emisi metana (CH₄) yang tinggi (Allam & Diyanty, 2020). Industri pertambangan di Indonesia memiliki regulasi yang sangat ketat oleh peraturan pemerintah dan praktik berkelanjutan yang terkait dengan pengungkapan sosial dan lingkungan. Berdasarkan regulasi yang ada, industri pertambangan diharapkan memiliki tingkat keterbukaan informasi yang berkelanjutan dan emisi karbon yang tinggi, sehingga faktor regulasi pada industri pertambangan menjadi faktor penting dalam keterbukaan emisi karbon (Allam & Diyanty, 2020).

2.2.4 Kinerja Lingkungan

Kinerja lingkungan merupakan mekanisme yang dilakukan perusahaan untuk mengintegrasikan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan ke dalam aktivitas operasi perusahaan secara sukarela dan dengan pemangku kepentingan, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum (Haholongan, 2016). Perusahaan akan berusaha menjaga lingkungan melalui tindakan dan penggunaan material yang tidak merusak lingkungan merupakan bentuk dari kinerja lingkungan yang baik (Anam, 2021).

Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik lebih termotivasi untuk terus memberikan informasi kepada investor dan pemangku kepentingan melalui tindakan ekstensif seperti pengungkapan lingkungan, dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang buruk (Clarkson et al., 2008). Skor kinerja lingkungan sering kali dipublikasikan untuk meningkatkan visibilitas lingkungan perusahaan, yang pada akhirnya menarik perhatian publik terhadap isu-isu lingkungan hidup perusahaan. Pada akhirnya, perhatian tersebut menyebabkan perusahaan meningkatkan kinerja lingkungannya untuk menunjukkan bahwa kinerja lingkungannya layak mendapat nilai tinggi, perhatian tersebut dilegitimasi dengan adanya pengungkapan lingkungan (Dawkins & Fraas, 2011).

Untuk mencapai legitimasi suatu perusahaan di mata masyarakat, diperlakukan kesadaran dan kinerja lingkungan yang baik, untuk mencapai hal tersebut perusahaan harus berupaya untuk selalu menjadi perusahaan yang peduli terhadap lingkungan (Darma et al., 2019). Perusahaan dengan tingkat tanggung jawab lingkungan yang baik dapat memberikan informasi yang relevan dan

terpercaya kepada kelompok sosial masyarakat (Setiawan & Iswati, 2019). Hal tersebut dikarenakan adanya tekanan eksternal dan internal agar kepercayaan masyarakat tetap harmonis serta mendapat dukungan dari masyarakat (Prafitri & Zulaikha, 2016).

2.2.5 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan saham oleh institusi atau lembaga keuangan seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi, bank, dana pensiun, serta lembaga keuangan lainnya (Rivandi, 2020). Kepemilikan saham oleh institusional dapat mendorong manajemen untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab lingkungan yang optimal dan dapat meningkatkan kontrol yang maksimal oleh pemilik saham institusional terhadap manajemen perusahaan (Akhiroh & Kiswanto, 2016) dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh institusional diyakini dapat memengaruhi kinerja perusahaan.

Kepemilikan institusional akan memengaruhi peninjauan lebih lanjut atas semua kegiatan yang terkait dengan pemangku kepentingan (Angelina & Handoko, 2023). Teori stakeholder menyatakan bahwa keterbukaan terhadap kegiatan operasional perusahaan merupakan sebab adanya ikatan yang erat antara perusahaan dengan pemangku kepentingan (Angelina & Handoko, 2023). Teori *stakeholder* menyatakan bahwa makin besar kepemilikan saham oleh institusional suatu perusahaan maka makin besar tekanan terhadap manajemen perusahaan untuk melakukan pengungkapan lingkungan yang lebih besar, dan makin besar dampak terhadap penguatan pengawasan perusahaan, sehingga perusahaan akan terdorong untuk melakukan pengungkapan atas semua kegiatan operasional yang

dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk meraih citra positif bagi para pemangku kepentingan (Hermawan et al., 2018; Latifah & Widiatmoko, 2022).

2.2.6 Ukuran Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan orang perseorangan yang memiliki wewenang dan memiliki tanggung jawab atas berbagai kegiatan yang berhubungan dengan perseroan (Carolina et al., 2020). Dewan direksi memiliki peranan yang sangat vital dalam suatu perusahaan. Dengan adanya pemisahan peran dengan dewan komisaris, dewan direksi memiliki kuasa yang besar dalam mengelola segala sumber daya yang ada dalam perusahaan (Rahardja, 2014).

Dewan direksi merupakan elemen penting tertinggi dari manajemen yang bertanggung jawab atas perolehan legitimasi dari seluruh pemangku kepentingan (Amaliyah & Solikhah, 2019). Untuk memperoleh legitimasi tersebut, perusahaan senantiasa melakukan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat, yaitu dengan melakukan pengungkapan lingkungan (Amaliyah & Solikhah, 2019). Ukuran dewan direksi dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan terkait lingkungan dan dampaknya pada pihak-pihak yang berkepentingan seperti investor, masyarakat dan regulator.

Sesuai dengan teori stakeholder, dewan direksi sebagai bagian dari perusahaan harus menjelaskan, berkonsultasi, dan melibatkan para pemangku kepentingan dalam programnya untuk memastikan bahwa aktivitasnya dipandang relevan baik bagi bisnis maupun pemangku kepentingan (Harmoni, 2013). Ukuran dewan direksi menggambarkan tata kelola perusahaan tersebut, karena pengambilan keputusan oleh direksi mempertimbangkan pendapat dari para anggota direksinya (Krisna & Suhardianto, 2016). Sesuai dengan teori

stakeholder, ukuran dewan direksi dapat menjadi faktor yang memengaruhi bagaimana perusahaan menanggapi permintaan atau tekanan dari berbagai pihak terkait pengungkapan emisi karbon, dengan komposisi dewan direksi yang inklusif terhadap berbagai kepentingan perusahaan cenderung lebih mungkin untuk mengungkapkan emisi karbon secara transparan.

2.3 Hubungan Antar Variabel dan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap *Carbon Emission Disclosure*

Kinerja lingkungan merupakan sebuah upaya yang dilakukan suatu organisasi yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya (Khoiriyah & Wirawan, 2021). Kinerja lingkungan memengaruhi seberapa besar mutu lingkungan dan juga lebih luas dalam mengungkapkannya (Darma et al., 2019).

Perusahaan yang mengungkapkan praktik pengelolaan limbahnya dan peduli terhadap lingkungan merupakan kabar baik bagi pemangku kepentingan dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat (Purnayudha & Hadiprajitno, 2022). Sesuai teori legitimasi, apabila perusahaan mempunyai hubungan sosial yang baik dengan masyarakat, dan perusahaan selalu memelihara hubungan sosial yang positif dengan masyarakat dan mengikuti norma yang berlaku. Selain itu, perusahaan harus selalu berkomitmen terhadap pelestarian lingkungan (Amaliyah & Solikhah, 2019).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengungkapan emisi karbon dipengaruhi oleh kinerja lingkungan (Saptiwi, 2019; Angelina & Handoko, 2023; Suzana et al., 2023; Krisnawanto & Solikhah, 2019; Purnayudha & Hadiprajitno, 2022; Setiawan & Iswati, 2019; Yusuf, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja lingkungan yang efektif dan secara konsisten

mengurangi emisi gas rumah kaca sesuai dengan peraturan yang berlaku akan menerima penghargaan PROPER dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan indeks yang lebih tinggi atau sangat baik. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Kinerja Lingkungan berpengaruh terhadap *Carbon Emission Disclosure*

2.3.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Carbon Emission Disclosure*

Kepemilikan institusional dapat mendorong manajemen untuk melakukan pengungkapan lingkungan yang optimal, dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh institusional diyakini dapat meningkatkan kontrol yang maksimal terhadap manajemen perusahaan dan dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (Akhiroh & Kiswanto, 2016). Kepemilikan institusional yang besar akan meningkatkan penguatan pengawasan perusahaan, sehingga perusahaan akan terdorong untuk mengungkapkan semua kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk meraih citra positifnya di mata pemangku kepentingan (Hermawan et al., 2018).

Teori stakeholder menyatakan bahwa keterbukaan atas segala kegiatan operasional perusahaan merupakan sebab adanya ikatan yang erat antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan (Angelina & Handoko, 2023). Berdasarkan teori stakeholders, para pemangku kepentingan menghendaki manajemen perusahaan untuk dapat memahami dan memenuhi harapan serta nilai yang ingin dicapai oleh pemangku kepentingan (Afni et al., 2018). Setiap aktivitas perusahaan memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk memaksimalkan laba, melainkan juga memperhatikan masyarakat, konsumen, pemasok, distributor yang

merupakan bagian dari operasional perusahaan dengan cara mengungkapkan tingkat emisi karbon yang dihasilkan perusahaan guna untuk menilai risiko bisnis yang berdampak pada perubahan iklim dan peluang keberlanjutan bisnis pada masa mendatang (Suherman & Kurniawati, 2023).

Hasil penelitian sebelumnya kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon (Angelina & Handoko, 2023; Pratiwi, 2018; Simamora & Mulyani, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah saham yang dimiliki oleh pihak institusi maka semakin besar pula pengawasan investor terhadap kinerja manajer perusahaan untuk mengungkapkan semua informasi perusahaan secara transparan, dan demi keberlanjutan perusahaan maka perusahaan harus melakukan pengungkapan emisi karbon yang dihasilkannya (Pratiwi, 2018). Hipotesis yang dapat dirumuskan sesuai dengan pemaparan di atas ialah:

H2 : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Carbon Emission Disclosure*.

2.3.3 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap *Carbon Emission Disclosure*

Sebagai badan manajemen puncak, dewan direksi bertanggung jawab untuk mengembangkan keberlanjutan strategi bisnis untuk mengawasi penggunaan aset perusahaan secara bijaksana (Jizi et al., 2014). Ukuran aset yang dimiliki perusahaan menyebabkan kuatnya tekanan dari pemangku kepentingan dan masyarakat untuk melakukan pengelolaan karbon yang lebih baik (Luo et al., 2013). Pengawasan ini dapat mendorong kegiatan yang menciptakan nilai dan

untuk memastikan bahwa risiko lingkungan yang dipantau dengan baik dan sepenuhnya diungkapkan.

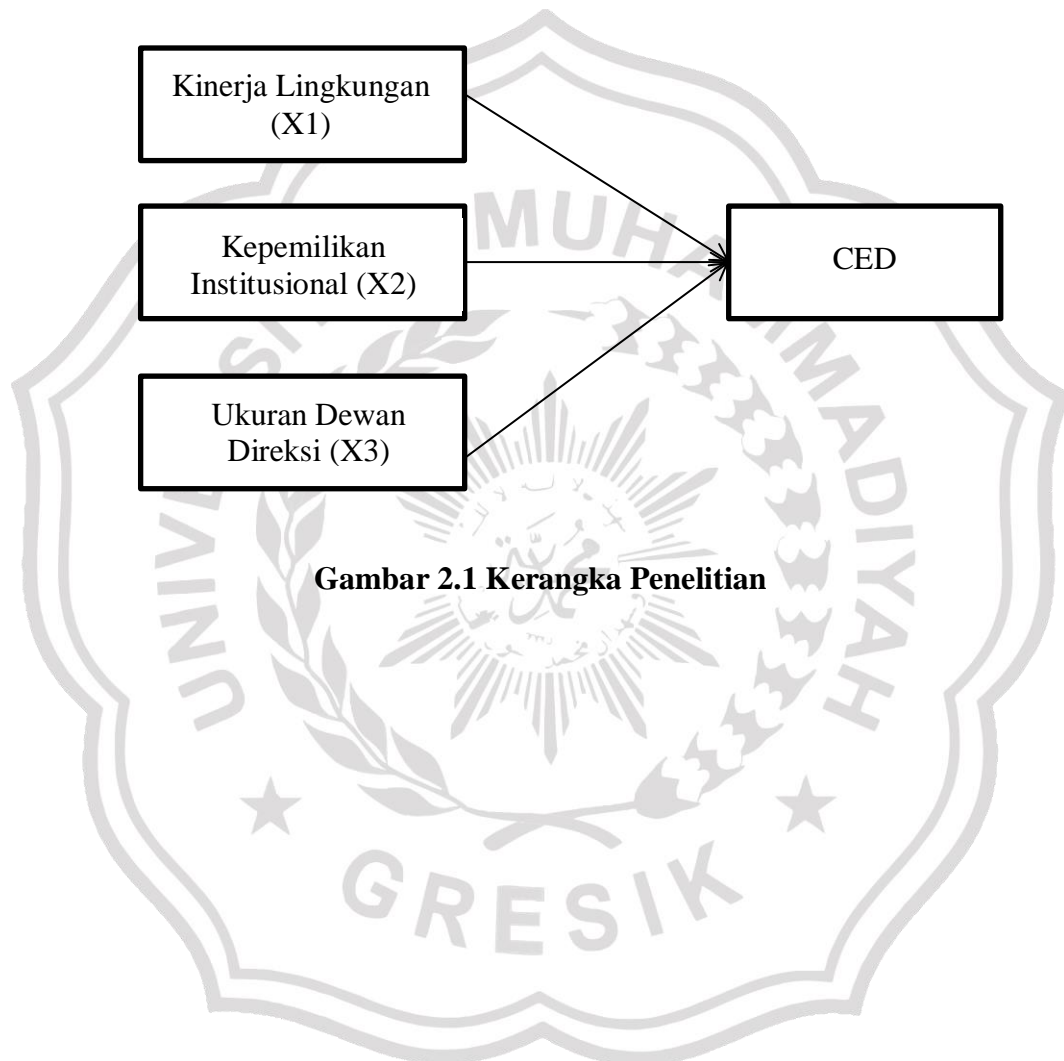
Dewan direksi bertanggung jawab untuk memastikan operasional perusahaan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Simamora et al., 2022). Ukuran dewan direksi menggambarkan tata kelola perusahaan, karena keputusan yang diambil oleh dewan direksi harus sejalan dengan pendapat anggota direksi (Krisnawanto & Solikhah, 2019).

Dewan direksi memiliki hak untuk mewakili perusahaan di dalam maupun di luar perusahaan. Secara logis jumlah dewan direksi akan sangat berpengaruh terhadap kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan nilai perusahaan, perusahaan dengan ukuran dewan yang lebih besar mungkin akan memiliki kekuatan yang lebih besar untuk menangani isu-isu yang berkaitan dengan pengungkapan emisi karbon (Kılıç & Kuzey, 2019). Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon (Suzana et al., 2023; Nasih et al., 2019; Simamora et al., 2022). Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan ukuran dewan yang lebih besar cenderung mengungkapkan emisi karbon. Temuan ini menunjukkan bahwa makin banyak jumlah komisaris dan direktur yang duduk di dewan direksi akan meningkatkan transparansi perusahaan untuk melakukan pengungkapan yang lebih banyak. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap *Carbon Emission Disclosure*

2.4 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian merupakan hubungan keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kinerja lingkungan, kepemilikan institusional dan ukuran dewan direksi dalam kaitannya dengan *carbon emission disclosure*. Kerangka penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian